

**PENGARUH PAD, DBH DAN DAU TERHADAP IKF
DI KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT**

**Rania Ralita
Lediana Sufina**
STIE EKUITAS Bandung
Email: lediana_sufina@yahoo.co.id

ABSTRACT

Overview of the financial capacity of each region are reflected through the common acceptance of the Regional Budget to fund government duties after deduction of personnel expenditures and associated with the number of poor can be seen through Indeks Fiscal Capacity. The purpose of this study is to determine the effect of regional Income, funds revenue and general allocation fund to Indeks of fiscal capacity in the districts / cities in West Java during the years 2011-2015 both partial and simultaneously. The method used in this research is descriptive and verification method. The population of this study in 27 district/city government of West Java that have the Budget Realization Report. A sample of 5 districts/cities in West Java during the years 2011-2015 and data used are secondary data. The analysis tool used is multiple linear regression analysis with the hypothesis t-test and F-test, and the correlation coefficient analysis and determination. The results of this study showed that simultaneous regional income, funds revenue and general allocation revenue is strongly influencing the Indeks of fiscal capacity. Partial test, regional income and General allocation revenue effect on indeks of fiscal capacity, while funds revenue has no effect on indeks of fiscal capacity.

Keywords: *Regional Income, Funds Revenue, General Allocation Revenue, and Indeks of Fiscal Capacity.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18A ayat (2) mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan, sumber pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Meskipun demikian, hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi dan situasi masyarakat setempat dalam sektor keuangan dapat dilihat melalui Kapasitas Fiskal yang menunjukkan kemandirian suatu daerah. Berdasarkan 37/PMK.07/2016 kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Tingkat gambaran kemandirian daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal (IKF) yang terdiri dari tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 1.1 Indeks Kapasitas Fiskal pada kabupaten/kota
Jawa Barat tahun 2015**

No	Kabupaten/kota Jawa Barat	IKF	Kategori	No	Kabupaten/kota Jawa Barat	IKF	Kategori
1	Kab. Bandung	0,19	rendah	13	Kab. Subang	0,13	rendah
2	Kab. Bekasi	0,69	sedang	14	Kab. Sukabumi	0,17	rendah
3	Kab. Bogor	0,25	rendah	15	Kab. Sumedang	0,14	rendah
4	Kab. Ciamis	0,16	rendah	16	Kab. Tasikmalaya	0,14	rendah
5	Kab. Cianjur	0,14	rendah	17	Kota Bandung	0,90	sedang
6	Kab. Cirebon	0,10	rendah	18	Kota Bekasi	0,53	sedang
7	Kab. Garut	0,08	rendah	19	Kota Bogor	0,43	rendah
8	Kab. Indramayu	0,15	rendah	20	Kota Cirebon	0,63	sedang
9	Kab. Karawang	0,23	rendah	21	Kota Depok	1,19	tinggi
10	Kab. Kuningan	0,10	rendah	22	Kota Sukabumi	0,65	sedang
11	Kab. Majalengka	0,14	rendah	23	Kota Tasikmalaya	0,20	rendah
12	Kab. Purwakarta	0,26	rendah	24	Kota Cimahi	0,49	rendah
				25	Kota Banjar	1,20	tinggi
				26	Kab. Bandung Barat	0,14	rendah

Sumber: Lampiran keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.07/2015

Berdasarkan tabel 1.1, dari 26 kabupaten/kota Jawa Barat terdapat 19 daerah di kabupaten/kota Jawa Barat dengan indeks kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat, rendahnya kapasitas fiskal ini mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah yang rendah dan dalam pengelolaan keuangannya memerlukan bantuan agar tidak terjadi kesetimpangan fiskal.

Indeks kapasitas fiskal di daerah kabupaten/kota Jawa Barat menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki Indeks Kapasitas Fiskal yang rendah hal tersebut salah satunya dikarenakan anggaran pendapatannya yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah rakyat miskin. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dimana suatu daerah yang memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PAD, DBH dan DAU dengan Indeks Kapasitas Fiskal dan mengambil judul “Pengaruh PAD, DBH dan DAU terhadap IKF Di Kabupaten/Kota Jawa Barat”.



Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat ?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat?

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

1. Pendapatan pemerintah pusat
 - a. Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri antara lain:
 - Pendapatan pajak penghasilan (migas dan non-migas),
 - Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM),
 - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
 - Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 - Pendapatan Cukai dan pajak lainnya,Sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
 - b. Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain:
 - Pendapatan Sumber Daya Alam,
 - Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba, dan
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
 - c. Pendapatan Hibah.



2. Pendapatan pemerintah daerah:

- a. Pendapatan Asli Daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah
 - Pendapatan pajak daerah,
 - Pendapatan retribusi daerah,
 - Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.

Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah: pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Menurut Purnomo (2009:34) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. . Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Nordiawan (2012:49), Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, terdapat dua sumber Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).



Menurut Nordiawan (2012:56), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun menurut Bastian (2009: 84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ketentuan Dana Alokasi Umum menurut Nordiawan (2012:56), yaitu:

1. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jika penentu proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

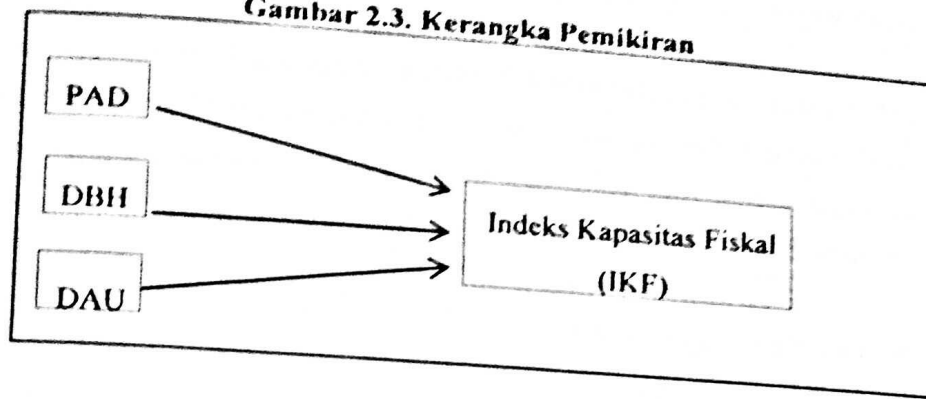
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.07/2016, peta kapasitas fiskal adalah gambaran peta kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah, yang dapat digunakan untuk:

1. Pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah
2. Penilaian atas usulan pinjaman daerah
3. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan / atau hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal, daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:

1. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sangat tinggi,
2. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi,
3. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang,
4. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Bertitik tolak pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- H_{01} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{02} : Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{a2} : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{03} : Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{a3} : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{04} : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
- H_{a4} : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif yang menggunakan jenis penelitian survey data sekunder dengan menekankan analisisnya pada data-data *numeric* dengan variabel independend adalah PAD (X_1), DBH (X_2) dan DAU (X_3), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah IKF (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Sistematis Sampling* sehingga daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Tipe penelitian ini adalah penelitian bersifat kuantitatif dengan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Dengan variabel PAD, DBH dan DAU didapat dari BPS JABAR., sedangkan IKF didapat dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal yang dapat didownload melalui www.jdih.kemenkeu.go.id.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Persamaan umum regresi yang menggunakan tiga variabel bebas sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Kapasitas Fiskal

β = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1, X_2, X_3 = Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

e = error

Untuk masuk ke model regresi tersebut, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat, sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, normalitas, autokorelasi dan *heterokedastisitas*.

Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$R = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Menurut Sugiono (2013:250), cara mengetahui keadaan korelasi dapat dilihat dari tabel dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kriteria Tingkat Koefisien

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Tinggi
0,80 - 1,000	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiono (2013:250)

Uji Hipotesis

Uji t

Menurut Priyatno (2012:139), uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis :

$H_{0.1}$: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

$H_{a.1}$: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

$H_{0.2}$: Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

$H_{a.2}$: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

$H_{0.3}$: Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

$H_{a.3}$: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:137). Uji F digunakan untuk menguji :

$H_{0.4}$: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

H_{a4} : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) fungsinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.839	.816	.19767	1.663

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DBH

b. Dependent Variable: IKF

Tabel diatas menunjukkan besar nilai koefisien korelasi sebesar 0,916. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi sangat kuat. Pada tabel interpretasi koefisien korelasi menunjukkan nilai korelasi berada pada interval 0,8-1. Dengan kata lain variabel PAD, DBH dan DAU memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dengan variabel Indeks Kapasitas Fiskal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5. Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,304	3,607		6,462	,000		
PAD	,361	,077	,427	4,673	,000	,919	1,088
DBH	,202	,099	,195	2,029	,055	,834	1,199
DAU	-1,739	,176	-,935	-9,857	,000	,853	1,172

a. Dependent Variable: IKF



Berdasarkan tabel dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 23,304 + 0,361 X_1 + 0,202 X_2 - 1,739 X_3 + \text{error}$$

Keterangan:

Y = Indeks Kapasitas Fiskal

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Bagi Hasil

X₃ = Dana Alokasi Umum

Interpretasi Model berdasarkan tabel 4.5. :

- Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen (PAD, DBH dan DAU). Dalam hal ini konstanta bernilai 23,304 maka memberikan pengertian bahwa Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Bagi Hasil (X₂), Dana Alokasi Umum (X₃) akan meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 23,304.
- Nilai koefisien PAD 0,361 menandakan jika setiap peningkatan 1 satuan rupiah Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak pada peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 0,361. Sedangkan nilai positif menunjukkan PAD memiliki hubungan yang positif terhadap IKF.
- Nilai koefisien DBH 0,202 menandakan jika setiap peningkatan 1 satuan rupiah PAD maka akan meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 0,202. Sedangkan nilai positif menunjukkan DBH memiliki hubungan yang positif terhadap IKF.
- Nilai koefisien DAU -1,739 menandakan jika setiap peningkatan 1 satuan rupiah Dana Alokasi Umum maka akan berdampak pada penurunan Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 1,739. Sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan negatif terhadap IKF.

Hipotesis Uji-t (T-test)

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Uji-t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,304	3,607		6,462	,000		
PAD	,361	,077	,427	4,673	,000	,919	1,088
DBH	,202	,099	,195	2,029	,055	,834	1,199
DAU	-1,739	,176	-,935	-9,857	,000	,853	1,172

a. Dependent Variable: IKF

$n = 25 ; k = 3$

Nilai t_{hitung} PAD = 4,673, sig = 0,000

Nilai t_{hitung} DBH = 2,029, sig = 0,055

Nilai t_{hitung} DAU = -9,857, sig = 0,000

df (degree of freedom) = $n-k-1 = 25-3-1 = 21$, sehingga nilai $t_{tabel} = 1,721$. Berdasarkan tabel 4.6. diatas maka diperoleh bahwa :

- Nilai t_{hitung} PAD sebesar 4,673 > nilai t_{tabel} 1,721 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap IKF.
- Nilai t_{hitung} DBH sebesar 2,029, menandakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,055 > α 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya bahwa DBH (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap IKF.
- Nilai t_{hitung} DAU sebesar -9,857, menandakan bahwa $t_{hitung} -9,857 < t_{tabel}$ 1,721 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < α 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa DAU (X_3) berpengaruh signifikan terhadap IKF.

Hipotesis Uji F

Tabel 4.7. Hasil pengujian Uji-F ANOVA
ANOVA*

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.269	3	1.423	36.419	.000 ^b
1 Residual	.821	21	.039		
Total	5.090	24			

a. Dependent Variable: IKF

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DBH

$n = 25 ; k = 3$

Nilai $F_{hitung} = 36,419$, sig. 0,000

df 1 (degree of freedom) = 3

df 2 (degree of freedom) = $n-k-1=25-3-1=21$; sig 0,05

Nilai $F_{tabel} = 3,072$

Hasil analisis uji-F pada tabel 4.7., menunjukkan bahwa nilai hipotesis F_{hitung} sebesar 36,419 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,072, artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai pada signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 < 0,05, artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan

bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien pada tabel 4.5. menunjukan besar nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,839 atau sebesar 83,9%. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal mampu dijelaskan oleh PAD, DBH dan DAU sebesar 0,839 atau 83,9% , sedangkan selebinya 16,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Dearah terhadap Indeks Kapasitas Fiskal

Dalam penelitia ini hipotesis yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Berdasarkan teori Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan tabel 4.6., hasil pengujian uji-t dengan menggunakan program SPSS versi 20,0 menunjukan H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal pada kabupaten/kota Jawa Barat. Hal ini, berarti semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah maka dapat meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal di suatu daerah sehingga dapat dikategorikan daerah tersebut sudah mampu untuk membiayai tugas pemerintahan. Dengan demikian, hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kapasitas Fiskal dapat diterima.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Kapasitas Fiskal

Hipotesis penelitian ini yaitu Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Secara teori dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada tabel 4.6., menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Meskipun persentase yang didapatkan daerah dari Dana Bagi Hasil cukup besar dan fungsi Dana Bagi Hasil untuk mendanai kebutuhan daerah, namun dana yang didapatkan daerah relatif kecil sehingga Dana Bagi Hasil bukan menjadi biaya utama dalam memenuhi kebutuhan peerintah. Dengan demikian, hipotesis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Kapasitas Fiskal tidak diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal

Hipotesis penelitian ini yaitu Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Secara teori, Dana Alokasi Umum dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uji-t yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20,0 Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Dengan adanya Dana Alokasi Umum suatu daerah dapat membiayai tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Dana Alokasi Umum yang memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Meskipun begitu, akan lebih baik jika suatu daerah dapat membiayai tugas pemerintah dengan hasil dananya sendiri yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal

Hipotesis penelitian ini yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Maka Hasil pengujian secara simultan pada tabel 4.7. menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} 36,419 > F_{tabel} 3,443$, maka H_0 ditolak. Sehingga berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20,0 tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat periode 2011-2015.

Pada tabel 4.5 menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,916 dan pada tabel interpretasi koefisien korelasi menunjukkan nilai korelasi berada pada interval 0,8-1 yang menandakan hubungan antara variabel sangat kuat. Dengan kata lain variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dengan variabel Indeks Kapasitas Fiskal.

Secara parsial hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal memiliki hasil pengaruh yang signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel Dana Bagi Hasil memberikan hasil pengaruh yang tidak signifikan. Namun, jika diuji secara simultan (bersama-

sama) maka menghasilkan pengaruh yang signifikan dengan hubungan yang sangat kuat. Hal tersebut dikarenakan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang jika dijumlahkan akan memberikan pendapatan yang lebih besar lagi sehingga seharusnya suatu daerah dapat mendanai kebutuhan pemerintah. Dengan demikian, hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Kapasitas Fiskal diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota Jawa Barat. Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal Hal ini, berarti semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah maka dapat meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal di suatu daerah sehingga dapat dikategorikan daerah tersebut sudah mampu untuk membiayai tugas pemerintahan.
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Kapasitas Fiskal, artinya bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Meskipun persentase yang didapatkan daerah dari Dana Bagi Hasil cukup besar dan fungsi Dana Bagi Hasil untuk mendanai kebutuhan daerah, namun dana yang didapatkan daerah relatif kecil sehingga Dana Bagi Hasil bukan menjadi biaya utama dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.
3. Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki pengaruh terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal. Dengan adanya Dana Alokasi Umum suatu daerah dapat membiayai tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Dana Alokasi Umum yang memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.
4. Jika diuji secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) yang menandakan tingkat hubungan yang sangat kuat variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dengan variabel Indeks Kapasitas Fiskal. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,839 atau sebesar 83,9%, artinya bahwa Indeks Kapasitas Fiskal mampu dijelaskan oleh PAD, DBH dan DAU sebesar 0,839 atau sebesar 83,9%, sedangkan selebihnya 16,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PMK nomor 33/PMK.07/2015 terdapat 19 daerah kabupaten/kota Jawa Barat yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal rendah, sebaiknya kabupaten/kota Jawa Barat dapat meningkatkan pendapatannya karena jika dilihat dari Indeks Kapasitas Fiskal, mayoritas daerah-daerah di Jawa Barat memiliki kategori Kapasitas Fiskal rendah. Hal tersebut menandakan bahwa daerah-daerah di Jawa Barat belum mampu untuk membiayai tugas pemerintahannya.
2. Berdasarkan PMK nomor 33/PMK.07/2015 terdapat 2 kabupaten/kota Jawa Barat yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal tinggi,sebaiknya daerah-daerah di Jawa Barat yang memiliki kategori Kapasitas Fiskal tinggi dalam penggunaan dana untuk pembiayaan tugas pemerintah lebih mengandalkan kepada Pendapatan Asli Daerah dari pada Dana Alokasi Umum karena Dana Alokasi Umum yang nilainya selalu lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak mengandalkan penerimaan dari pusat saja.
3. Sebaiknya daerah-daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal yang tinggi dibatasi dalam pemberian dana perimabangannya terutama pada penerimaan Dana Alokasi Umum sehingga suatu daerah dapat lebih menggali lagi kekayaan daerahnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan variabel independennya ditambah sehingga lebih banyak, misalnya dengan menambahkan variabel pendapatan lainnya maupun biaya pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Afiah, Nunuy Nur. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bastian, Indra. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fiona, Liza, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. (2016). *Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah di Sumatera*. Volume XXI/Jurnal Ekonomi, no . Juli 2016. Hal 232-247.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- J.Supranto. (1999). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyunu Sandi Putra dan Maulida Rahmawati. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- _____, Nomor 244/PMK.07/2011 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- _____, Nomor 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- _____, Nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- _____, Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- _____, Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____, Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priyatno, Duwi. (2010). *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____, (2012). *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, Budi S..(2009). *Obligasi Daerah Alternatif Investasi Masyarakat dan Sumber Bagi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT.Elex Media Komput Indo
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sarjono, H dan Winda, J.. (2011). *SPSS VS LISRELL*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. (2014). Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiayawati, Anis dan Ardi Hamzah. (2007). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Vol 2, no.2. Hal 211-228. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sugiono. (2012).*Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, (2013). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. (2009). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____, Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wadira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ISSN 2252-6765

www.jdih.kemenkeu.go.id.

www.djpk.depkeu.go.